

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ghofir (2000) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan nasional. Bagi negara Indonesia Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memanfaatkan kekayaan alam setiap daerah secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Disahkannya undang-undang tentang otonomi daerah dengan tujuan yaitu pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengelola sumber penerimaan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Artinya daerah yang otonom harus memiliki kemampuan untuk menemukan dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah dan mengurangi sebisa mungkin ketergantungan kepada pemerintah pusat supaya menciptakan kemandirian daerah. Semakin banyak penerimaan dari daerah

sendiri, maka akan memungkinkan daerah dalam mempercepat laju pertumbuhan di daerahnya sendiri sehingga masyarakat sekitar dapat sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, sumber-sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari: a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, d. lain-lain pendapatan daerah yang sah, 2. Dana perimbangan, 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan PAD dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah, pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lain karena potensi yang berbeda. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Jaka Sriyana, 1999:4).

Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta merupakan daerah otonom yang mana mempunyai hak untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri, salah satu upaya pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta dalam meningkatkan PAD adalah melalui pemungutan pajak daerah, pajak merupakan salah satu komponen PAD yang sangat berpotensi dan mempunyai prospek yang

bagus, ditambah juga Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta masih menyimpan rapi warisan budaya , adat, dan ciri khas yang lain. Sehingga Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta menjadi destinasi pariwisata turis lokal maupun internasional yang kemudian merangsang pembangunan infrastruktur seperti hotel, restoran, apartemen, dan fasilitas publik lainnya. Lalu pemerintah Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta mendapatkan pemasukan berupa pajak dari hasil pembangunan tersebut setiap tahunnya, adapun jenis-jenis pajak daerah di Provinsi D.I.Yogyakarta sesuai pasal 2 undang-undang No. 34 tahun 2000 terdiri dari : Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak material bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak Air bawah tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak perolehan atas tanah dan bangunan. Realisasi pajak daerah di Provinsi D.I.Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Realisasi pajak daerah di Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2014.

Kota/Kabupaten	PAD			Realisasi PAD(%)	Kontribusi Pajak Terhadap PAD(%)
	Target	Realisasi	Sektor Pajak		
Bantul	265,128,000,000	357,411,062,723	99,558,470,705	134.81	27.86
Kulon Progo	92,218,500,000	158,800,563,703	21,171,477,417	172.63	13.33
Sleman	383,487,000,000	573,337,000,000	326,033,995,236	149.51	56.87
Gunung Kidul	90,333,000,000	159,304,338,220	28,477,674,863	176.35	17.88
Yogyakarta	404,272,000,000	470,634,000,000	253,996,000,000	116.42	53.97

Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, data diolah.*

Berdasarkan pada tabel diatas jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah melampaui target yang telah ditetapkan, dari prosentase penghasilan yang paling tinggi adalah Kabupaten Gunung Kidul dengan prosentase 176.35% dan paling rendah adalah Kota Yogyakarta dengan prosentase 116.42, namun apabila dilihat dari banyaknya jumlah uang yang masuk peringkat pertama adalah Kabupaten Sleman dan paling bawah adalah Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian kontribusi pajak Daerah paling tinggi berdasarkan prosentase adalah Kabupaten Sleman dan kedua adalah Kota Yogyakarta.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi D.I.Yogyakarta**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi D.I.Yogyakarta yang potensial. Namun demikian. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota/kabupaten yang ada di Provinsi D.I.Yogyakarta mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami peningkatan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kabupaten/kota provinsi D.I.Yogyakarta, diantaranya faktor jumlah Penduduk, inflasi, pendapatan perkapita, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis sejauh mana faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di provinsi D.I.Yogyakarta, hal ini tertuang dalam rumusan masalah berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak Daerah di Provinsi D.I.Yogyakarta?
- 2) Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak Daerah di Provinsi D.I.Yogyakarta ?
- 3) Bagaimana pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak Daerah di Provinsi D.I.Yogyakarta?

- 4) Bagaimana pengaruh belanja langsung terhadap penerimaan pajak Daerah di Provinsi D.I.Yogyakarta ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian faktor penerimaan pajak sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi D.I.Yogyakarta?
- 2) Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi D.I.Yogyakarta?
- 3) Untuk menganalisis pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak Daerah di D.I. Yogyakarta?
- 4) Untuk menganalisis pengaruh belanja langsung terhadap penerimaan pajak Daerah di D.I.Yogyakarta?

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang di harapkan :

- 1) Bagi Pemerintah Daerah

Dapat berfungsi sebagai referensi pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak khususnya dan secara umum peningkatan terhadap PAD di Kota/Kabupaten Provinsi D.I.Yogyakarta.

- 2) Bagi Masyarakat Luas

Dapat di jadikan pengetahuan bagi masyarakat umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa yang ingin memahami masalah yang berkaitan dengan Penerimaan pajak serta faktor yang mempengaruhinya.

3) Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan memperluas pengetahuan tentang pajak daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

